
Advokasi Berbasis Bukti : Tantangan dan Kebutuhan

Lusi Herlina

Konsil LSM

Indonesia

KEBEBASAN
BERORGANISASI
adalah **HAK**
AKUNTABILITAS
adalah
KEWAJIBAN

Ekosistem Advokasi LSM

- Situasi Lingkungan hukum OMS mengalami kemunduran, 2019-2020.
- Konsistensi Pemerintah menerapkan prinsip *due process of law* dipertanyakan
- Ancaman kekerasan melalui media sosial oleh *buzzer*, diikuti penangkapan oleh aparat keamanan
- Kebebasan berorganisasi, berserikat dan menyatakan pendapat terancam
- Menguatnya politik identitas dan intoleransi mempersempit ruang kebebasan berserikat dan berpendapat di daerah, terutama LSM Perempuan
- Intimidasi sosial, politik dan keamanan terhadap LSM LGBTI

Referensi utama : CSO Sustainability Index 2019-2020

Kinerja Advokasi LSM

Sejumlah Rancangan Peraturan Perundangan berhasil diadvokasi oleh OMS, seperti :

- RUU PKS
- RUU PPRT
- Penolakan RUU Ketahanan Keluarga
- Surat Edaran Kepala LKPP No. III Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 440/5538/SJ.

Sejumlah Rancangan Peraturan Perundangan berhasil diadvokasi oleh OMS, seperti :

- Peraturan Bupati tentang: PPRG (Kalbar)
- Musdes/Musrenbang khusus perempuan/anak/disabilitas/kelembagaan/rentan lainnya (Kalbar)
- Pencegahan Perkawinan Anak (Kab. Seluma, Bengkulu)

Namun kekuatan masyarakat sipil (koalisi LSM, akademisi, buruh dll), nasional dan daerah tidak berhasil mengadvokasi Omnibus Law UU Cipta kerja.

Kinerja LSM dalam Advokasi Berbasis Bukti

Apakah LSM sudah melakukan advokasi berbasis bukti ? sebagian menjawab sudah, meski kurang yakin dengan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan advokasi berbasis bukti

- Jaringan LSM/LSM yang bekerja di isu Lingkungan : data terkait isu lingkungan, seperti : data kebakaran hutan/lahan, data spesies yang makin punah (tumbuhan/hewan), data luasan hutan yang terbuka.

- Jaringan LSM/LSM yang bekerja di isu Hak Asasi Perempuan : data IPM, Indeks Pembangunan Gender, Angka Kekerasan, survey pengaduan, baseline survey

Tantangan dan Kebutuhan Advokasi Berbasis Bukti

Keterampilan melakukan kajian

Ketidaktersediaan data valid dan integratif.

Sulit akses data, prosedur panjang

Belum ada kolaborasi dan sinergi dengan lembaga penelitian

Jumlah staf dan dana yang terbatas

Format pendataan stakeholders beragam sehingga menyulitkan pengolahan dan Analisa data

Kajian/penelitian jarang didanai oleh lembaga donor

Rendahnya Praktek Akuntabilitas LSM

Tantangan Fundamental LSM dalam Advokasi Berbasis Bukti

- Parpol sebagai institusi demokrasi, gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri (Kompas, 12 Maret)
- Fenomena hampir sama terjadi di LSM, sebagai institusi/pilar utama demokrasi bahkan dijuluki sebagai lokomotif demokrasi
- Penting sekali bagi LSM membangun sistem Akuntabilitasnya, guna mendukung agenda LSM mengadvokasi pemerintah, sektor bisnis, agar akuntabel dan demokratis.
- LSM bekerja diruang publik, mengeluarkan argumen tandingan melawan interpretasi resmi atau pendapat umum, karena itu LSM perlu mempunyai reputasi yang kokoh
- Sebuah Axioma dalam Pendidikan Orang Dewasa : **“Saya Tahu karena Saya Melakukannya”**
- Rendahnya Praktek Akuntabilitas dan prinsip-prinsip *Governance* yang Baik di LSM
- Isu utamanya adalah : Rotasi Kepemimpinan secara berkala, Tidak berfungsinya Dewan Pengurus (*Board*)/tidak berjalannya mekanisme *check and balances*, *Conflict of interest*, Penegakan Aturan Organisasi, dll
- Tanpa basis bukti yang memadai, LSM berhadapan dengan isu konstituensi Konstituensi : memastikan bahwa agenda/aktivitas CSO mewakili kebutuhan dan kepentingan konstituen.

Terimakasih Banyak